

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Kamarudin, 2005, *Akutansi Manajemen Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, Muhammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa.

Amin Widjaja Tunggal, 2000, *Auditing Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Bagir Manan. 1994. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.

Cole W Gerald. 2002. *Sistem Akuntansi Zaki Baridwan (Penyusunan Prosedur dan Metode)*. Edisi Kelima, cetakan kedelapan. Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Fauzi. 1999. *Pedoman dan Prosedur Pemeriksaan Akuntan*. Surabaya:Penerbit Indah.

Franz Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, sejarah diferensiasi sosial di Jawa, 1830-1980*, Jakarta, Grasindo, 1998.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.

Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum pidana*, Cv Diadit Media, Jakarta.

Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.

Ismail, Masya. 1994. *Teori Prosedur*. Jakarta: Raja Grafindo.

L.J.Aa Damen, et. Al., 2005. *Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving*, (Den Haag: BJU Boom Juridische Uitgevers, Tweede Druk.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akutansi*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.

Nur Basuki Minarno, 2009. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya : Laksbang Mediatama, hal 72-79.

Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977).

SF, Marbun 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Sjachran Basah. 1985. *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni, Bandung.

Soemardjan, Selo. (1992). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tanter, Richard dan Kenneth Young, 1993, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Wasistiono Sadu, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung.

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1276>, 30 juni 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa Negeri, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 18);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 28);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 54);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 54);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 11);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2015 Nomor 27);